

Katalog: 9302023.9417

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
MENURUT PENGELUARAN

2015 - 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

**KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
MENURUT PENGELUARAN**

2015 - 2019

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISBN : 978-602-71375-5-4

No. Publikasi : 94170.2004

Katalog BPS : 9302023.9417

Ukuran Buku : 17,6x25,01 cm

Jumlah Halaman : viii + 88 Halaman

Naskah :

© Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang

Gambar Kulit :

© Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Menurut teori ekonomi, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep SNA2008.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga memungkinkan terbitnya buku ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Oksibil, Mei 2020

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pegunungan Bintang**



Samijan, S.ST, M.Stat.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	5
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5. Perubahan Inventori	27
2.6. Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	33
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019	
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Papua Menurut Pengeluaran	37
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	43
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	48
3.4. Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .	52
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	54

DAFTAR ISI

3.7.	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	56
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019		
4.1.	PDRB (Nominal)	61
4.2.	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	62
4.3.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	63
4.4.	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	64
4.5.	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	65
4.6.	Perbandingan PDRB terhadap Impor	66
4.7.	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan ...	67
4.8.	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	69
4.9.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	70
PENUTUP		75
LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019	38
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019	40
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019	41
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	42
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	43
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	45
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	46
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	47
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	48
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	50
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	53
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	55
Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	56
Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	61

DAFTAR TABEL

Tabel 16.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015-2019	63
Tabel 17.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015-2019	64
Tabel 18.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	65
Tabel 19.	Rasio Ekspor Luar Negeri terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015-2019	66
Tabel 20.	Rasio PDRB terhadap Impor Luar Negeri Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019	67
Tabel 21.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	68
Tabel 22.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019	70
Tabel 23.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019	72

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019 (Juta).....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Kabupaten Pegunungan Bintang	79
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran , Kabupaten Pegunungan Bintang	80
Tabel 3. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang	81
Tabel 4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang	82
Tabel 5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Kabupaten Pegunungan Bintang	83
Tabel 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang	84
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang	85
Tabel 8. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran , Kabupaten Pegunungan Bintang	86
Tabel 9. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang	87



bintangkab.bps.go.id

<https://peg>



1

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori

lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

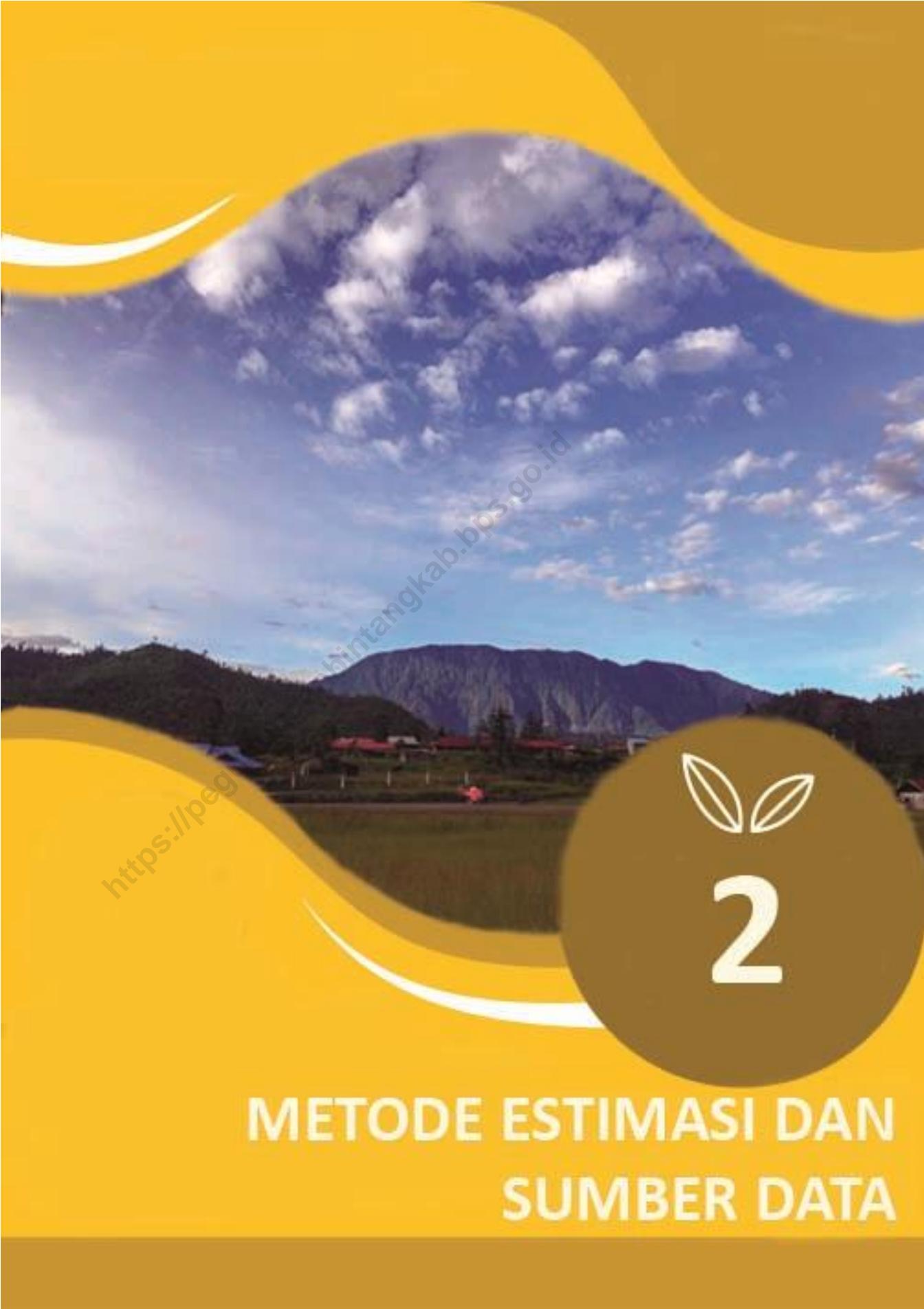
Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



bintangkab.bps.go.id

https://peg



2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x $(30/7)$ x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator *supply* komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Kabupaten/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai

seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga.

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$.

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$.

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia,

dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup:

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- b. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Penggunaan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Papua}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Kabupaten/Kota adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

1. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap

dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

3. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated*

asset), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

4. Penghitungan PMTB Tahunan

4.1. Sumber data:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level kabupaten/kota).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level kabupaten/kota.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

4.2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

4.2.1. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

4.2.2. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan

men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali

nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material* dan *supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.

- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

2.1. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

2.2. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten/kota dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



bintangkab.bps.go.id

<https://peg>



3

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019**

Struktur ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang yang berubah diakibatkan oleh proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Pegunungan Bintang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. TINJAUAN AGEGAT PDRB KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Papua ADHB selama periode tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun, 2019 PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 1.915.536,25 juta rupiah meningkat sebesar 46,17 persen dari tahun 2015. Peningkatan nilai tersebut juga dialami oleh

komponen pengeluaran penyusun PDRB tersebut. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kuantitas/volume barang atau jasa maupun inflasinya.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 [†]	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 108.629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
2. Konsumsi LNPR	11 448,91	12 579,84	13 526,28	14 393,57	16 335,41
3. Konsumsi Pemerintah	482 312,39	524 766,65	536 264,35	565 577,22	585 641,27
4. PMTB	626 192,01	683 501,53	720 602,99	772 647,00	813 756,22
5. Perubahan Inventori	2 824,20	3 989,35	4 368,63	4 820,24	4 787,52
6. Net Ekspor	(920 913,36)	(1 004 840,95)	(989 628,98)	(1 035 976,15)	(1 049 155,57)
Total PDRB	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25

Catatan : [†] Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2015–2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen

pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

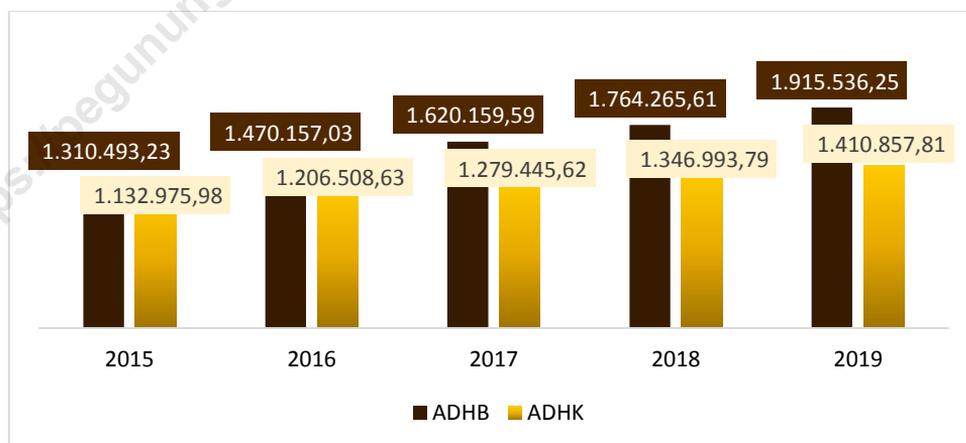
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	815 041,24	867 162,99	926 137,06	970 614,31	1 013 997,60
2. Konsumsi LNPRT	8 555,57	9 070,33	9 759,38	10 267,81	11 274,20
3. Konsumsi Pemerintah	381 833,25	398 165,28	407 472,39	418 739,25	421 097,19
4. PMTB	460 537,59	488 798,45	516 961,44	540 807,48	557 776,30
5. Perubahan Inventori	1 294,31	1 558,44	1 725,29	1 859,89	1 737,97
6. Net Ekspor	(534 285,97)	(558 246,86)	(582 609,94)	(595 294,94)	(595 025,45)
Total PDRB	1 132 975,98	1 206 508,63	1 279 445,62	1 346 993,79	1 410 857,81

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan

karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah diiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	84,60	85,04	82,40	81,78	80,61
2. Konsumsi LNPRT	0,87	0,86	0,83	0,82	0,85
3. Konsumsi Pemerintah	36,80	35,69	33,10	32,06	30,57
4. PMTB	47,78	46,49	44,48	43,79	42,48
5. Perubahan Inventori	0,22	0,27	0,27	0,27	0,25
6. Net Ekspor	(70,27)	(68,35)	(61,08)	(58,72)	(54,77)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, penyumbang terbesar PDRB adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga menyumbang 80,61 persen, PMTB sebesar 42,48 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 30,57 persen terhadap PDRB. Sedangkan konsumsi LNPRT dan perubahan inventori hanya memberikan kontribusi kurang dari 1 persen terhadap PDRB. Di sisi lain, nilai net ekspor yang juga besar justru dapat menurunkan PDRB. Nilai net ekspor pada tahun 2019 sebesar minus 54,77 persen mengalami penurunan kontribusi jika dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Adapun kontribusi impor terhadap PDRB adalah sebesar minus 70,27 persen (2015); minus 68,35 persen (2016); minus 61,08 persen (2017); dan minus 58,72 persen (2018). Selama periode 2015-2019, perdagangan antar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor selalu lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan antar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,25	6,39	6,80	4,80	4,47
2. Konsumsi LNPRT	5,32	6,02	7,60	5,21	9,80
3. Konsumsi Pemerintah	4,04	4,28	2,34	2,77	0,56
4. PMTB	6,34	6,14	5,76	4,61	3,14
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,94	6,49	6,05	5,28	4,74

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,74 persen. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2015-2019 yaitu sebesar 6,49 persen. Sedangkan angka pertumbuhan

terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,74 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015, 2017, dan 2018 berturut-turut sebesar 5,94 persen; 6,05 persen; dan 5,28 persen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015-2019

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	136,02	144,17	144,15	148,65	152,29
2. Konsumsi LNPRT	133,82	138,69	138,60	140,18	144,89
3. Konsumsi Pemerintah	126,31	131,80	131,61	135,07	139,08
4. PMTB	135,97	139,83	139,39	142,87	145,89
5. Perubahan Inventori	218,20	255,98	253,98	259,17	275,47
6. Net Ekspor	172,36	180,00	169,86	174,03	176,32
Total PDRB	115,67	121,85	126,63	130,98	135,77

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan pergerakan yang dinamis.

Perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen di Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 15,67 persen di tahun 2015; 21,85 persen pada tahun 2016; 26,63 persen pada tahun 2017; 30,98 persen pada tahun 2018; dan 35,77 persen pada tahun 2019. Perubahan harga pada tahun 2015-2019 di atas 10 persen, yang artinya terjadi inflasi sedang di Kabupaten Pegunungan Bintang selama periode tersebut.

¹ Indeks perkembangan

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga mempunyai porsi yang besar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan pola yang terus meningkat. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 85,04 persen sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 80,61 persen.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1 108 629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	815 041,24	867 162,99	926 137,06	970 614,31	1 013 997,60
c. Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	84,60	85,04	82,40	81,78	80,61
2. Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	64 216,23	71 613,71	75 476,39	80 554,06	84 630,68
b. ADHK 2010	47 210,45	49 674,23	52 359,63	54 190,96	55 573,69
3. Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	15 459,90	17 240,98	18 170,30	19 393,57	20 374,88
b. ADHK 2010	11 365,80	11 959,05	12 605,13	13 046,59	13 379,40
4. Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	6,25	6,39	6,80	4,80	4,47
b. Per-RT	4,75	5,22	5,41	3,50	2,55
c. Perkapita	4,75	5,22	5,40	3,50	2,55
Jumlah RT (<i>unit</i>)	17 264	17 457	17 688	17 911	18 246
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	71 710	72 511	73 473	74 396	75 788

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Data tabel 6, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Bintang menghabiskan dana sekitar 64.216,23 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 71.613,71 ribu rupiah (2016); 75.476,29 ribu rupiah (2017); 80.554,06 ribu rupiah (2018); dan 84.639,68 ribu rupiah (2019).

Sementara itu pada ADHK, dalam kurun waktu lima tahun rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh di atas 3,00 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,41 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan konsumsi per-kapita secara “riil”

berkisar antara 3,50 persen s.d 5,40 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 6,25 persen (2015); 6,39 persen (2016); 6,80 persen (2017); 4,80 persen (2018); dan 4,47 persen (2019). Sedangkan konsumsi per-kapita dari 4,75 persen tumbuh menjadi 5,22 persen di tahun 2016, tumbuh kembali menjadi 5,40 persen (2017), turun menjadi 3,50 persen (2018) dan turun kembali hingga 2,55 persen (2019).

Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang hanya pada kisaran 1,12-1,87 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019³

Komponen Pengeluaran (1)	(Persen)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 ^r (4)	2018* (5)	2019** (6)
Konsumsi Makanan	70,22	71,67	72,39	72,48	72,58
Konsumsi Non Makanan	29,78	28,33	27,61	27,52	27,42
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata dari tahun 2015 s.d 2019, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung selalu berada pada kisaran yang sama. Proporsi pengeluaran untuk makanan pada masing-masing tahun

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

sebesar 70,22 persen (2015); 71,67 persen (2016); 72,39 persen (2017); 72,48 persen (2018); dan sebesar 72,58 persen (2019).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran (1)	(Persen)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 [†] (4)	2018* (5)	2019** (6)
Konsumsi Makanan	6,60	6,83	7,50	4,91	4,70
Konsumsi Non Makanan	5,43	5,36	5,12	4,54	3,91
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,25	6,39	6,80	4,80	4,47

Catatan : [†] Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok non makanan masing-masing sebesar 5,43 persen (2015); 5,36 persen (2016); 5,12 persen (2017); 4,54 persen (2018); dan sebesar 3,91 persen (2019). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga bukan makanan dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya perubahan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019⁴

Komponen Pengeluaran (1)	(Persen)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 ^r (4)	2018* (5)	2019** (6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	3,70	7,74	0,34	3,14	2,37
Pakaian dan Alas Kaki	3,64	2,07	-0,42	1,64	1,68
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,58	1,55	-0,58	3,90	3,50
Kesehatan & Pendidikan	2,66	1,99	-3,54	1,17	1,40
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,22	2,51	-0,92	2,10	1,29
Hotel & Restoran	1,19	0,97	-0,87	2,96	1,82
Lainnya	1,17	1,84	-0,88	4,14	3,55
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,38	5,99	-0,01	3,12	2,45

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9 selalu fluktuatif, yaitu berada pada kisaran minus 0,01 hingga 5,99 persen selama lima tahun terakhir untuk total kelompok konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Rokok cenderung mengalami fluktuasi dengan rincian sebesar 3,70 persen (2015); 7,74 persen (2016); 0,34 persen (2017); 3,14 persen (2018); dan 2,37 persen (2019). Selain itu kelompok makanan dan minuman non beralkohol, komponen pengeluarannya cenderung mengalami penurunan.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran termasuk rendah jika dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data menggambarkan hal tersebut, dimana besar proporsi terhadap PDRB selalu dibawah 1 (satu) persen.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	11 448,91	12 579,84	13 526,28	14 393,57	16 335,41
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	8 555,57	9 070,33	9 759,38	10 267,81	11.274,20
c. Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,87	0,86	0,83	0,82	0,85
d. Pertumbuhan (ADHK)	5,32	6,02	7,60	5,21	9,80

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel 10. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir LNPRT selalu mengalami peningkatan baik dari sisi nominal (ADHB) maupun riil (ADHK).

Secara rata-rata dari tahun 2015 s.d 2019, terlihat bahwa struktur konsumsi akhir LNPRT berkisar antara 0,82 – 0,87 persen terhadap total PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang. Proporsi pengeluaran cenderung berada pada kisaran yang sama, yakni sebesar 0,87 persen (2015); 0,86 persen (2016); 0,83 persen (2017); 0,82 persen (2018); dan 0,85 persen (2019).

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran LNPRT menunjukkan pola pergerakan percepatan yang dinamis, yakni sebesar 5,32 persen (2015); 6,02 persen (2016); 7,60 persen (2017); 5,21 persen (2018); dan 9,80 persen (2019). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi LNPRT dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 482.312,39 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 585.641,27 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB justru mengalami penurunan, dari 36,80 persen pada tahun 2015 menjadi 30,57 persen pada tahun 2019.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	482 312,39	524 766,65	536 264,35	565 577,22	585 641,27
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	381 833,25	398 165,28	407 472,39	418 739,25	421 097,19
c. Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	36,80	35,69	33,10	32,06	30,57
Konsumsi Pemerintah per-kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	6 725,87	7 237,06	7 298,79	7 602,25	7 727,36
b. ADHK 2010	5 324,69	5 491,10	5 545,88	5 628,52	5 556,25
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	203 937,59	221 233,83	226 081,09	247 300,93	257 311,63
b. ADHK 2010	161 451,69	167 860,57	171 784,31	183 095,43	185 016,34
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	4,04	4,28	2,34	2,77	0,56
b. Konsumsi perkapita	2,57	3,13	1,00	1,49	-1,28
c. Konsumsi per-pegawai	-4,32	3,97	2,34	6,58	1,05
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	2 365	2 372	2 372	2 287	2 276
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	71.710	72.511	73.473	74.396	75 788

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Catatan : pegawai pemerintah yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita ADHK sebesar

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

5.324,69 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Konsumsi pemerintah per-kapita ADHK (2010) menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 2,57 persen di tahun 2015; 3,13 persen di tahun 2016; 1,00 persen di tahun 2017; 1,49 persen di tahun 2018; dan turun menjadi 1,28 persen pada tahun 2019.

Konsumsi pemerintah per pegawai menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 203.937,59 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase laju pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 6,58 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan (baik ADHB maupun ADHK 2010). Sedangkan jumlah pegawai pemerintah, pergerakannya lebih berfluktuasi. Selama periode tahun 2015 s.d 2019 pola jumlah pegawai pemerintah cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat menurun ditahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 2.365 orang, 2.372 orang di tahun 2016, 2.375 orang di tahun 2017, 2.287 orang di tahun 2018, dan sebesar 2.276 orang di tahun 2019. Dalam kurun waktu 2015 - 2019, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 89 orang atau naik sebesar 3,76 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan perlambatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber

daya finansial oleh pemerintah. Selama periode 2015-2019 rincian untuk percepatan total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 4,04 persen; 4,28 persen; 2,34 persen; 2,77 persen; dan 0,56 persen. Sedangkan untuk konsumsi per-kapita sebesar 2,57 persen (2015); 3,13 persen (2016); 1,00 persen (2017); 1,49 persen (2018); minus 1,28 persen (2019). Selain itu, untuk konsumsi per-pegawai sebesar minus 4,32 persen (2015); 3,97 persen (2016); 2,34 persen (2017); 6,58 persen (2018); dan 1,05 persen (2019).

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data pada tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah cenderung menurun secara gradual menjadi 2.276 orang (2019). Jumlah penduduk justru meningkat dari 71.710 orang pada tahun 2015 menjadi 75.788 orang pada tahun 2019. Sedangkan rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah sebesar 30,32 (2015); 30,57 (2016); 30,98 (2017); 32,53 (2018); dan sebesar 33,30 pada tahun 2019. Hal ini berarti pada tahun 2015 dan 2019 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 31 sampai 34 penduduk.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dari 6,34 persen di tahun 2015; menjadi 6,14 persen di tahun 2016; menjadi 5,76 persen di tahun 2017; turun menjadi 4,61 persen di tahun 2018; dan turun kembali menjadi 3,14 di tahun 2019.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	626 192,01	683 501,53	720 602,99	772 647,00	813 756,22
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	460 537,59	488 798,45	516 961,44	540 807,48	557 776,30
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	47,78	46,49	44,48	43,79	42,48
Struktur PMTB ⁸					
Bangunan (<i>Juta Rp</i>) (%)	75,20	74,92	74,46	74,31	74,35
Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>) (%)	24,80	25,08	25,54	25,69	25,65
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁹ (%)					
a. Bangunan	6,77	6,56	5,61	4,21	3,22
b. Non Bangunan	4,93	4,73	6,28	5,96	2,87
Total PMTB	6,34	6,14	5,76	4,61	3,14

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Pertumbuhan di sektor bangunan cenderung mengalami perlambatan pada tahun 2015-2019. Pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 6,77 persen, melambat menjadi 6,56 persen ditahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2019 bangunan mengalami perlambatan masing-masing sebesar 5,61 persen (2017); 4,21 persen (2018); dan 3,22 persen (2019).

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB juga relatif stabil selama periode 2015 – 2019. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Peranan komponen non bangunan terhadap total PMTB pada tahun 2015 sebesar 24,80 persen. Proporsi non bangunan pada tahun 2016 meningkat menjadi 25,08 persen; 25,54 persen pada tahun 2017; 25,69 persen pada tahun 2018; dan 25,65 persen pada tahun 2019.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan terjadi pola positif yang bervariasi antar tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 4,93 persen melambat menjadi 4,73 persen ditahun 2016. Sementara itu, terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 6,28 persen dan melambat lagi pada tahun 2018 menjadi 5,96 persen. Pada tahun 2019 non bangunan kembali mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 2,87 persen.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau

negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	2 824,20	3 989,35	4 368,63	4 820,24	4 787,52
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1 294,31	1 558,44	1 725,29	1 859,89	1 737,97
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	0,22	0,27	0,27	0,27	0,25

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih lanjut. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2015 perubahan inventori sebesar 2.824,20 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3.989,35 juta

rupiah atau bertambah sebesar 1.165,14 juta rupiah dari tahun 2015. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 4.368,63 juta rupiah, dan kembali meningkat sebesar 4.820,24 juta rupiah ditahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 perubahan inventori Kabupaten Pegunungan Bintang menurun menjadi 4.787,52 juta rupiah atau berkurang sebesar 32,71 juta rupiah.

3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Kegiatan ekspor dan impor tidak hanya dilakukan dari dan ke luar negeri, tetapi juga dari dan keluar Provinsi Papua. Indikator ini disebut dengan ekspor impor antar daerah. Sama halnya dengan impor luar negeri, impor antar daerah juga diperlakukan sebagai faktor koreksi (pengurang).

Nilai nominal net ekspor diperoleh dari selisih antara ekspor dan impor antar daerah. Dikarenakan nilainya yang berasal dari pengurangan tersebut, net ekspor antar daerah dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	(920 913,36)	(1 004 840,95)	(989 628,98)	(1 035 976,15)	(1 049 155,57)
b. ADHK 2000 (<i>Juta Rp</i>)	(534 285,97)	(558 246,86)	(582 609,94)	(595 294,94)	(595 025,45)
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	(70,27)	(68,35)	(61,08)	(58,72)	(54,77)
Pertumbuhan (%)	-	-	-	-	-

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Nilai net ekspor ADHB Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2015 sebesar minus 920.913,36 juta rupiah, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi minus 1.049.155,57 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang belum mampu berkontribusi dalam perdagangan di luar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sejalan dengan nilai net ekspor ADHB, nilai net ekspor ADHK 2010 juga menunjukkan arah pergerakan yang sama, yaitu terus meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar minus 534.285,97 juta rupiah (2015); minus 558.246,86 juta rupiah (2016); minus 582 609,94 juta rupiah (2017); minus 595.294,94 juta rupiah (2018); dan minus 595.025,45 juta rupiah (2019).

Selama kurun waktu 2015-2019, proporsi net ekspor Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap total PDRB cenderung meningkat, yaitu dari minus 70,27 persen pada tahun 2015 menjadi minus 54,77 persen di tahun 2019.

<https://pegununganbintangkab.bps.go.id>



<https://peg>

bintangkab.bps.go.id



4

**PERKEMBANGAN AGREGAT DPRB
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah/produksi/lapangan usaha, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25
- ADHK 2010	1 132 975,98	1 206 508,63	1 279 445,62	1 346 993,79	1 410 857,81
Pertumbuhan ADHK 2010	5,94	6,49	6,05	5,28	4,74
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	18 274,90	20 274,95	22 051,09	23 714,52	25 274,93
- ADHK 2010	15 799,41	16 638,97	17 413,82	18 105,73	18 615,85
Pertumbuhan ADHK 2010	4,44	5,31	4,66	3,97	2,82
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	71 710	72 511	73 473	74 396	75 788
Pertumbuhan	1,43	1,12	1,33	1,26	1,87

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan pola kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sedangkan pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga menunjukkan kecenderungan pola peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, sehingga pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama periode 2015-2019 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penggunaan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang (rata-rata 82,89 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, 80 persen lebih digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 16. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1 108 629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	13 586,72	14 476,71	15 130,16	15 594,53	16 063,28
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	81,60	86,36	88,25	92,52	96,13

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga 82 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan ekspor. Perubahan pola rasio terus mengalami peningkatan. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga dan nilai ekspor semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Namun, perubahan pola rasio konsumsi terhadap ekspor disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor yang berfluktuasi.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Pegunungan Bintang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1 108 629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	626 192,01	683 501,53	720 602,99	772 647,00	813 756,22
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,77	1,83	1,85	1,87	1,90

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berbeda halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung lebih stabil yaitu selalu berada di bawah 2 (dua). Adapun rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dari sebesar 1,77 pada tahun 2015; 1,83 pada tahun 2016; 1,85 pada tahun 2017; 1,87 pada tahun 2018; dan meningkat menjadi 1,90 pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya percepatan investasi secara signifikan diikuti oleh pergerakan konsumsi akhir rumah tangga yang juga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	1 108 629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
b. LNPRT	11 448,91	12 579,84	13 526,28	14 393,57	16 335,41
c. Pemerintah	482 312,39	524 766,65	536 264,35	565 577,22	585 641,27
Jumlah	1 602 390,38	1 787 507,11	1 884 816,95	2 022 774,52	2 146 148,07
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25
Proporsi	122,27	121,59	116,34	114,65	112,04

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Nilai konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan proporsinya terhadap PDRB yang juga cenderung meningkat. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang lebih kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 19. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB)
Tahun 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 [†]	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	13 586,72	14 476,71	15 130,16	15 594,53	16 063,28
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	626 192,01	683 501,53	720 602,99	772 647,00	813 756,22
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Catatan : [†] Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2015-2019 PMTB selalu mempunyai nilai yang lebih tinggi dari ekspor (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Terjadi pola rasio yang stabil diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif sama dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 20. Rasio PDRB terhadap Impor Luar Negeri Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	934 500,08	1 019 317,66	1 004 759,14	1 051 570,68	1 065 218,85
Rasio PDRB terhadap Impor	1,40	1,44	1,61	1,68	1,80

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015 sebesar 1,40 meningkat menjadi 1,44 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 1,61 pada tahun 2017, kembali meningkat menjadi 1,68 pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 rasio PDRB terhadap impor Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 1,80. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 21. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Juta Rp)</u>	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25
Persentase (%)	41,22	41,90	44,64	45,62	47,34
Total nilai Impor ADHB (Juta Rp)	934 500,08	1 019 317,66	1 004 759,14	1 051 570,68	1 065 218 85
Persentase (%)	29,39	29,05	27,68	27,19	26,33
<u>Total Permintaan Akhir¹ (Juta Rp)</u>	3 179 493,39	3 508 792,34	3 629 677,88	3 867 406,98	4 045 973,95
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan rentang 26,33smpai 29,39 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 41,22 sampai 47,34 persen. Dalam kurun waktu 2015-2019, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.179.493,39 juta (2015) menjadi sebesar 4.045.973,95 juta rupiah (2019).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.310.493,23 juta rupiah (2015); 1.470.157,03 juta rupiah (2016); 1.620.159,59 juta rupiah (2017); 1.764.265,61 juta rupiah (2018); dan sebesar 1.915.536,25 juta rupiah pada tahun 2019. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 934.500,08 juta rupiah (2015); 1.019.317,66 juta rupiah (2016); 1.004.759,14 juta rupiah (2017); 1.051.570,68 juta rupiah (2018); dan sebesar 1.065.218,85 juta rupiah (2019).

¹ Termasuk diskrepansi statistik

4.8 NERACA PERDAGANGAN AN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum.

Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2015-2019, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pegunungan Bintang dengan luar wilayah, selalu menunjukkan negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pegunungan Bintang selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar.

**Tabel 22. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	13 586,72	14 476,71	15 130,16	15 594,53	16 063,28
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	934 500,08	1 019 317,66	1 004 759,14	1 051 570,68	1 065 218,85
Rasio ekspor thdp Impor	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Perdagangan Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan 2019 tercatat **defisit** masing-masing dengan impor sebesar 934.500,08 juta rupiah (2015), 1.019.317,66 juta rupiah (2016), 1.004.759,14 juta rupiah (2017), 1.051.570,68 juta rupiah (2018); dan 1.065.218,85 juta rupiah (2019). Sementara rasio ekspor terhadap impor relatif stabil dari tahun 2015 sampai 2019, yaitu sebesar 0,01 hingga 0,02.

4.9. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"**ICOR**" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

1. Koefisien ICOR Negatif:

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output/NTB pada satu waktu tertentu lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Penurunan output/NTB terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum memproduksi atau telah memproduksi namun output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output sebelumnya. Sehingga, selisih output pada tahun ditanamkan investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR pun menjadi negatif.

Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Dipihak lain, apabila tidak ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi inefisiensi. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

2. Koefisien ICOR Besar

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif/tidak efisien sehingga menghasilkan koefisien ICOR yang relatif besar.

Penggunaan koefisien ICOR yang besar untuk perencanaan harus hati-hati. Akan lebih baik jika ICOR yang digunakan adalah ICOR rata-rata dari beberapa tahun series data. Ini lebih mencerminkan kondisi ICOR yang sesungguhnya.

**Tabel 23. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Tahun 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta rupiah)	1 132 975,98	1 206 508,63	1 279 445,62	1 346 993,79	1 410 857,81
Perubahan (Juta rupiah)	63 514,15	73 532,65	72 936,99	67 548,17	63 864,01
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	460 537,59	488 798,45	516 961,44	540 807,48	557 776,30
ICOR	7,25	6,65	7,09	8,01	8,73

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR bergerak fluktuatif dari sebesar 7,25 pada tahun 2015, turun pada tahun 2016 menjadi 6,65, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 7,09, dan meningkat lagi menjadi 8,01 pada tahun 2018, dan kembali meningkat menjadi 8,73 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa inventasi yang ditanamkan selama periode 2015-2019 belum efektif atau tidak efisien.



bintangkab.bps.go.id

<https://peg>



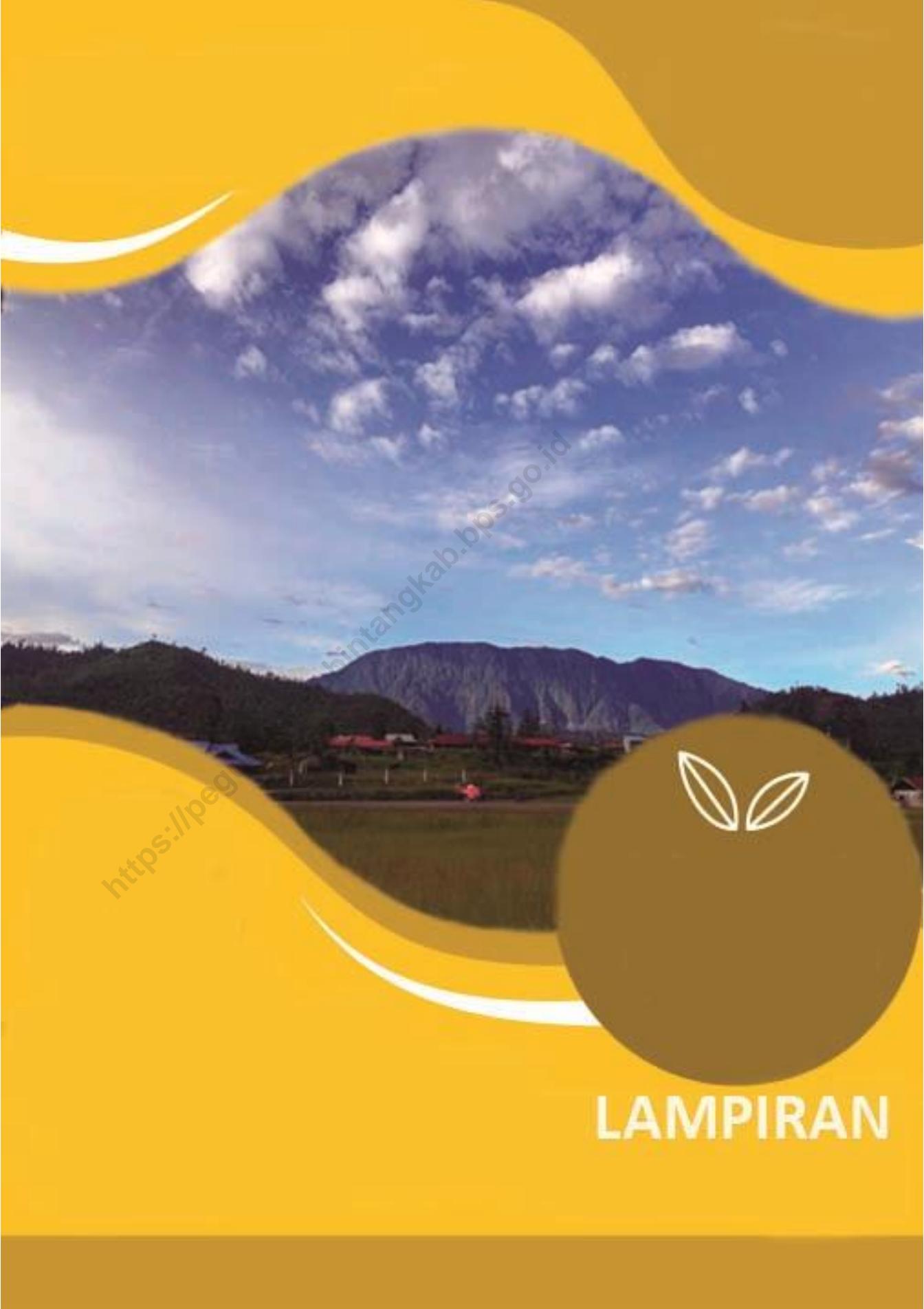
5

PENUTUP

PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri sipil), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposibel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).



bintangkab.bps.go.id

<https://peg>



LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 108 629,08	1 250 160,61	1 335 026,32	1 442 803,74	1 544 171,39
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	778 498,16	896 024,41	966 440,46	1 045 693,81	1 120 734,46
b. Pakaian dan Alas Kaki	30 014,47	32 530,14	34 403,08	37 184,95	40 082,68
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	151 248,28	163 384,09	170 838,50	185 291,00	197 600,92
d. Kesehatan & Pendidikan	34 791,89	37 024,57	38 436,13	41 577,66	44 921,02
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	54 495,59	58 177,64	60 330,39	64 178,70	67 889,41
f. Hotel & Restoran	21 071,22	22 124,09	22 562,53	23 842,10	24 905,51
g. Lainnya	38 509,47	40 895,68	42 015,24	45 029,69	48 037,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11 448,91	12 579,84	13 526,28	14 393,57	16 335,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	482 312,39	524 766,65	536 264,35	565 577,22	585 641,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	626 192,01	683 501,53	720 602,99	772 647,00	813 756,22
a. Bangunan	470 891,73	512 074,09	536 547,18	574 150,54	605 040,34
b. Non-Bangunan	155 300,27	171 427,44	184 055,80	198 496,46	208 715,88
5. Perubahan Inventori	2 824,20	3 989,35	4 368,63	4 820,24	4 787,52
6. Net Ekspor	(920 913,36)	(1 004 840,95)	(989 628,98)	(1 035 976,15)	(1 049 155,57)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	1 310 493,23	1 470 157,03	1 620 159,59	1 764 265,61	1 915 536,25

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	815 041,24	867 162,99	926 137,06	970 614,31	1 013 997,60
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	574 372,89	613 593,52	659 586,49	691 975,49	724 464,73
b. Pakaian dan Alas Kaki	22 026,54	23 387,44	24 839,44	26 414,33	28 001,84
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	108 328,00	115 229,08	121 190,20	126 509,26	130 357,22
d. Kesehatan & Pendidikan	26 140,41	27 275,57	29 355,56	31 388,46	33 444,03
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	39 324,63	40 955,40	42 866,21	44 668,36	46 645,08
f. Hotel & Restoran	15 810,16	16 440,27	16 913,10	17 359,20	17 809,13
g. Lainnya	29 038,62	30 281,71	31 386,06	32 299,21	33 275,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8 555,57	9 070,33	9 759,38	10 267,81	11 274,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	381 833,25	398 165,28	407 472,39	418 739,25	421 097,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	460 537,59	488 798,45	516 961,44	540 807,48	557 776,30
a. Bangunan	353 948,86	377 167,57	398 322,23	415 095,19	428 451,19
b. Non-Bangunan	106 588,73	111 630,88	118 639,21	125 712,29	129 325,11
5. Perubahan Inventori	1 294,31	1 558,44	1 725,29	1 859,89	1 737,97
6. Net Ekspor	(534 285,97)	(558 246,86)	(582 609,94)	(595 294,94)	(595 025,45)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	1 132 975,98	1 206 508,63	1 279 445,62	1 346 993,79	1 410 857,81

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	184,07	207,57	221,66	238,55	256,38
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	185,65	213,67	230,47	249,37	267,26
b. Pakaian dan Alas Kaki	185,88	201,45	213,05	230,28	248,23
c. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	182,59	197,24	206,24	223,69	238,55
d. Kesehatan & Pendidikan	169,99	180,90	187,80	203,15	219,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	180,39	192,58	199,71	212,46	224,73
f. Hotel & Restoran	173,18	181,83	185,43	195,95	204,69
g. Lainnya	182,33	193,63	198,93	213,20	227,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	194,35	213,55	229,61	244,33	277,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	170,09	185,06	189,11	199,45	206,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	193,95	211,70	223,19	239,31	252,04
a. Bangunan	194,13	211,11	221,20	236,70	249,44
b. Non-Bangunan	193,39	213,48	229,20	247,19	259,91
5. Perubahan Inventori	(12,01)	(16,97)	(18,58)	(20,50)	(20,36)
6. Net Ekspor	261,75	285,61	281,28	294,46	298,20
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	156,15	175,17	193,04	210,21	228,24

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	135,32	143,98	153,77	161,15	168,36
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	136,97	146,32	157,29	165,01	172,76
b. Pakaian dan Alas Kaki	136,41	144,84	153,83	163,58	173,41
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	130,78	139,11	146,30	152,72	157,37
d. Kesehatan & Pendidikan	127,72	133,27	143,43	153,36	163,41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	130,17	135,57	141,90	147,86	154,40
f. Hotel & Restoran	129,94	135,12	139,00	142,67	146,37
g. Lainnya	137,49	143,37	148,60	152,93	157,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	145,23	153,97	165,67	174,30	191,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	134,65	140,41	143,69	147,67	148,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142,64	151,39	160,12	167,50	172,76
a. Bangunan	145,92	155,49	164,21	171,13	176,64
b. Non-Bangunan	132,73	139,01	147,74	156,55	161,05
5. Perubahan Inventori	(5,50)	(6,63)	(7,34)	(7,91)	(7,39)
6. Net Ekspor	151,86	158,67	165,60	169,20	169,13
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	134,99	143,76	152,45	160,49	168,10

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	84,60	85,04	82,40	81,78	80,61
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	59,40	60,95	59,65	59,27	58,51
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,29	2,21	2,12	2,11	2,09
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,54	11,11	10,54	10,50	10,32
d. Kesehatan & Pendidikan	2,65	2,52	2,37	2,36	2,35
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,16	3,96	3,72	3,64	3,54
f. Hotel & Restoran	1,61	1,50	1,39	1,35	1,30
g. Lainnya	2,94	2,78	2,59	2,55	2,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,87	0,86	0,83	0,82	0,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36,80	35,69	33,10	32,06	30,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,78	46,49	44,48	43,79	41,48
a. Bangunan	35,93	34,83	33,12	32,54	31,59
b. Non-Bangunan	11,85	11,66	11,36	11,25	10,90
5. Perubahan Inventori	0,22	0,27	0,27	0,27	0,25
6. Net Ekspor	(70,27)	(68,35)	(61,08)	(58,72)	(54,77)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,94	71,87	72,39	72,06	71,87
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	50,70	50,86	51,55	51,37	51,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,94	1,94	1,94	1,96	1,98
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,56	9,55	9,47	9,39	9,24
d. Kesehatan & Pendidikan	2,31	2,26	2,29	2,33	2,37
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,47	3,39	3,35	3,32	3,31
f. Hotel & Restoran	1,40	1,36	1,32	1,29	1,26
g. Lainnya	2,56	2,51	2,45	2,40	2,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,76	0,75	0,76	0,76	0,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33,70	33,00	31,85	31,09	29,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	40,65	40,51	40,41	40,15	39,53
a. Bangunan	31,24	31,26	31,13	30,82	30,37
b. Non-Bangunan	9,41	9,25	9,27	9,33	9,17
5. Perubahan Inventori	0,11	0,13	0,13	0,14	0,12
6. Net Ekspor	(47,16)	(46,27)	(45,54)	(44,19)	(42,17)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,25	6,39	6,80	4,80	4,47
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,60	6,83	7,50	4,91	4,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,35	6,18	6,21	6,34	6,01
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,53	6,37	5,17	4,39	3,04
d. Kesehatan & Pendidikan	4,40	4,34	7,63	6,93	6,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,58	4,15	4,67	4,20	4,43
f. Hotel & Restoran	4,95	3,99	2,88	2,64	2,59
g. Lainnya	4,44	4,28	3,65	2,91	3,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,32	6,02	7,60	5,21	9,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,04	4,28	2,34	2,77	0,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,34	6,14	5,76	4,61	3,14
a. Bangunan	6,77	6,56	5,61	4,21	3,22
b. Non-Bangunan	4,93	4,73	6,28	5,96	2,87
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	5,94	6,49	6,05	5,28	4,74

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	136,02	144,17	144,16	148,65	152,29
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	135,54	146,03	146,52	151,12	154,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	136,27	139,09	138,50	140,78	143,14
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	139,62	141,79	140,97	146,46	151,58
d. Kesehatan & Pendidikan	133,10	135,74	130,93	132,46	134,32
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	138,58	142,05	140,74	143,69	145,54
f. Hotel & Restoran	133,28	134,57	133,40	137,35	139,85
g. Lainnya	132,61	135,05	133,87	139,41	144,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	133,82	138,69	138,60	140,18	144,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	126,31	131,80	131,61	135,07	139,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,97	139,83	139,39	142,87	145,89
a. Bangunan	133,04	135,77	134,70	138,32	141,22
b. Non-Bangunan	145,70	153,57	155,14	157,90	161,39
5. Perubahan Inventori	218,20	255,98	253,98	259,17	275,47
6. Net Ekspor	172,36	180,00	169,86	174,03	176,32
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	115,67	121,85	126,63	130,98	135,77

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pegunungan Bintang
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,38	5,99	(0,01)	3,012	2,45
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,70	7,74	0,34	3,14	2,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,64	2,07	(0,42)	1,64	1,68
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,58	1,55	(0,58)	3,90	3,50
d. Kesehatan & Pendidikan	2,66	1,99	(3,54)	1,17	1,40
e. Transportasi, Kamunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,22	2,51	(0,92)	2,10	1,29
f. Hotel & Restoran	1,19	0,97	(0,87)	2,96	1,82
g. Lainnya	1,17	1,84	(0,88)	4,14	3,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,38	3,64	(0,07)	1,14	3,36
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,99	4,34	(0,14)	2,63	2,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,02	2,84	(0,32)	2,49	2,12
a. Bangunan	3,21	2,05	(0,79)	2,68	2,10
b. Non-Bangunan	6,63	5,40	1,02	1,78	2,21
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	4,72	5,35	3,92	3,43	3,66

Catatan : ^r Angka Diperbaiki * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

HALAMAN KOSONG

<https://pegununganbintangmb.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kampung Dabolding, Distrik Kolomdol
Email: bps9417@bps.go.id

ISBN 978-602-71375-5-4

